



## Menangkap Peluang Menuju Kota Layak Anak

**Jogja berpeluang ditetapkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) oleh Pemerintah Pusat. Banyak indikator telah terpenuhi. Predikat KLA penting untuk pembangunan kota inklusif, terutama menyangkut anak-anak.**

Yusef Leon S. Sunartono  
redaksi@harianjogja.com

**S**alah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mewujudkan kota inklusif adalah dengan mewujudkan hak-hak anak. Langkah ini didukung dengan memperluas jejaring untuk memberikan layanan maksimal terhadap anak.

Penjabat (PJ) Wali Kota Jogja Sumadi mengatakan KLA merupakan predikat yang cukup tinggi pada sebuah kota seperti Jogja. Setelah ini, menurut Sumadi fasilitas untuk mendukung tumbuh kembang anak sudah dipenuhi.

Salah satunya yang telah dilakukan Kota Jogja adalah menyiapkan banyak ruang bagi anak untuk kegiatan positif sehingga anak bisa menyalurkan ekspresi dan

berbagai kemampuannya. Sejumlah ruang yang disediakan adalah ruang seni, budaya pendidikan, olahraga dan keagamaan.

"Di Kota Jogja sudah menyediakan ruang-ruang itu sehingga anak bisa terpenuhi hak-haknya. Komitmen ini sudah dilakukan selama beberapa tahun melalui beragam program," kata Sumadi, belum lama ini. Melalui banyak kegiatan tersebut harapannya bisa meminimalkan potensi kenakalan pada anak.

Sumadi menyebut dari berbagai hasil diskusi dan penelitian, rata-rata anak melakukan kenakalan disebabkan karena lingkungan seperti adanya ruang saling berkumpul untuk kegiatan yang tidak jelas. "Sehingga melalui pendampingan dan tersedianya banyak kegiatan, anak lebih banyak menyalurkan waktunya untuk kegiatan positif," katanya.

Selain itu memberikan pendampingan melalui dinas terkait terhadap keluarga rentan agar mereka bisa membimbing dan mengawasi anak. Ia menambahkan Kota Jogja menjadi salah satu yang lolos verifikasi untuk wilayah DIY sebagai salah satu Kota Layak Anak. Karena upaya untuk mengarah ke predikat tersebut telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir melalui berbagai program.

Pemkot Jogja pada prinsipnya siap untuk ditinjau Pemerintah Pusat. "Secara umum sudah siap karena telah dipersiapkan, seperti ruang-ruang publik dan fasilitas umum di Kota Jogja sebagian besar sudah ramah bagi anak. Seperti di puskesmas, sektor pendidikan dan lainnya."

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja, Aman Yuradijaya mengatakan penentuan hak dan perlindungan kepada anak menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari pembangunan kota inklusif.

Anak adalah masa depan pembangunan, menurut Aman harus mendapat perhatian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "KLA punya peran yang strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif di Jogja," katanya, Jumat (24/6).

Menurutnya, capaian pemenuhan indikator KLA yang kini telah diraih Pemkot Jogja melibatkan banyak pihak baik itu swasta, media massa, dan juga

penyelenggara pemerintahan di tingkat terbawah. Tiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga punya semangat yang sama dalam mewujudkan Jogja sebagai KLA.

"Dengan begitu semua program bisa berkelanjutan," ungkapnya. Aman menambahkan, keterlibatan Pemkot Jogja dalam mewujudkan KLA juga didukung lewat politik anggaran dengan mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### Ketercapaian Program

Tujuan penganggaran adalah untuk mewujudkan sejumlah program dan kebijakan dalam pemenuhan hak anak. "Dengan begitu KLA selain menuju pembangunan yang inklusif juga sebagai sebuah kebutuhan yang akan diterapkan di kelembagaan," jelasnya.

Beberapa program yang telah diwujudkan untuk mendukung KLA yakni berupa Satuan Tugas (Satgas) Siap Gerak Atas Kekerasan (Sigrak), pendirian fasilitas umum ramah anak berupa Kampung Ramah Anak (KRA), Sekolah Ramah Anak (SRA), tempat ibadah ramah anak, lembaga yang mengurus hak anak serta mengintegrasikan program anak sampai ke tingkat kelurahan.

"Sampai saat ini sudah ada sebanyak 456 SRA, 193 KRA, enam rumah ibadah ramah anak, 18 puskesmas ramah anak dan dua rumah sakit ramah anak," kata Aman.

Aman menyebut dalam penyelenggaraan KLA di suatu wilayah keterlibatan anak wajib diikutsertakan dalam menentukan program dan juga kebijakan yang nantinya akan diambil. Menurut Aman, hal ini sangat erat kaitannya dengan pelibatan anak dalam rencana pembangunan daerah serta menentukan sendiri apa yang nanti akan dijalankan. "Dari awal sampai akhir pandangan dan aspirasi anak harus diperhatikan serta dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan, maknanya muncul Musrenbang anak," ungkap Aman.



**Sumadi**  
Penjabat Wali Kota Jogja

**Aman Yuradijaya**  
Sekretaris Daerah Kota Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut Untuk Diketahui
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005